

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Irshani Ashrawiyadi

irshaniashrawiyadi@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is aimed to find out the influence of human resources quality, the use of information technology and the internal control to the Reliability of Financial Reporting with case study at Local Apparatus Working Unit (SKPD) in East Java Province. This research is a quantitative research. The data collection method has been done by conducting survey. The data uses primary data which has been obtained by issuing questionnaires to the respondents. The sample collection technique has been done by using purposive sampling method. The numbers of samples are 96 respondents. Meanwhile, the analysis technique has been done by using multiple linear regressions analysis. The result of the research shows that the human resources quality, the use of information technology and the internal control give positive influence to the Reliability of Financial Reporting. The result of the research has supported all of the hypotheses which has been formulated in this research.

Keywords: Human resources quality, the use of information technology, internal control, the reliability of financial reporting.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan dengan studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dengan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 96 responden. Sedangkan, teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan. Hasil penelitian ini telah mendukung semua hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Keterandalan Pelaporan Keuangan

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu. Keandalan dan *timeliness* informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya laporan keuangan daerah harus diaudit dan dalam hal ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan diaudit untuk memeriksa salah satunya apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, juga apakah laporan keuangan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada seperti yang ditetapkan perundang-undangan yakni, laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kualitas informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan. Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompoten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan - pelatihan, dan juga mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009). Senada dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Primayana *et al.* (2014) memperoleh hasil bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa semakin memadai kualitas sumber daya manusia maka pemerintah daerah juga akan semakin baik dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Indriasari dan Nahartyo (2008) memperoleh hasil bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Ketidaksignifikanan ini disebabkan kondisi kualitas sumber daya manusia di subbagian akuntansi/tata usaha keuangan yang belum mendukung. Kapasitas sumber daya manusia yang memadai, namun jika tidak didukung dengan teknologi informasi yang memadai belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal. Sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi akan sangat membantu dalam proses pengolahan data transaksi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terbebas dari kesalahan material yang disebabkan oleh *human error*.

Komputer telah menggantikan teknologi manual dengan melakukan pemrosesan atas data yang jumlahnya sangat besar, ataupun menjalankan pekerjaan yang sangat kompleks. Komputer juga dapat bekerja sangat konsisten serta reliabel (dapat dipercaya) dalam waktu yang lebih cepat bila dibanding dengan kemampuan manusia. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta dapat menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam PP No. 65 tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan uang dilakukan teus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk meyakinkan *stakeholders* maupun publik tentang keakuratan dan keandalan laporan keuangan yang dibuat pemerintah maka dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal. Pengendalian intern diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem.

Senada dengan itu Purwono (2007) menyatakan sebuah sistem pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk meniadakan semua peluang terjadinya kesalahan atau penyelewengan, akan tetapi sebuah sistem pengendalian intern yang baik dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang dapat dianggap layak, serta seandainya hal tersebut terjadi maka akan segera dapat diketahui dan diatasi. Pengendalian intern disusun agar pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban yang merupakan cerminan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

TINJAUAN TEORETIS

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori keagenan disebutkan bahwa terdapat pendelegasian wewenang dari pemilik perusahaan (*principal*) kepada manajemen perusahaan (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Pembuatan keputusan oleh manajer perusahaan (*agent*) harus bisa diterima sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan segala konsekuensinya. Teori keagenan sudah mulai berkembang berawal dari adanya penelitian oleh Jensen dan Meckling (1976) yang mengacu pada pemenuhan tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan disebut *principal*. Maksimalisasi kekayaan *principal* akan diserahkan kepada pihak-pihak yang dianggap profesional untuk mengelola perusahaan. Pihak profesional tersebut dalam perusahaan disebut sebagai manajemen, yang dalam teori keagenan disebut sebagai *agent*.

Teori keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) diantara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. Hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut *principal* menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai *agent*, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada *agent* tersebut (Brigham dan Houtson, 2006:26). Teori yang menjelaskan hubungan *principal* dan *agent* ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan sosiologi, dan teori organisasi. Teori *principal-agent* menganalisis susunan diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak baik eksplisit maupun implisit dengan pihak lain yaitu *agent* dengan bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh *principal*. Pola hubungan antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD) adalah kemitraan dan bersifat sejajar (Bastian, 2006:346).

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas

vertikal) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal). Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009).

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari tingkat tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yang mana tanggungjawab tersebut diuraikan didalam *job description*. Dengan *job description* yang jelas akan dapat membantu seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik. Didalam menjalankan fungsi akuntansi diperlukan kemampuan tidak hanya mencatat transaksi dan membuat laporan keuangannya saja, tetapi juga diperlukan kemampuan dalam menentukan pilihan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi, merancang, serta menganalisa sistem akuntansi yang ada.

Menurut Tjiptoherijanto (2001) untuk menilai kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Havesi, 2005). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya.

Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000). Teknologi informasi terdiri dari bagian utama yaitu teknologi komputer dan perlengkapan komputer yang berfungsi untuk menerima data, menyimpan data dan mengolah data menjadi informasi, serta mencetak atau membuat dan mengkomunikasikan informasi tersebut.

Hamzah (2009) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya: (1) Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan

proses kerja secara elektronik. (2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi/instansi pemerintah dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan *e-government* (Hamzah, 2009).

Perubahan dalam pola penyusunan laporan keuangan daerah yang awalnya secara manual dilihat tidak efektif, efisien dan untuk nilai keandalan suatu laporan keuangan masih kurang keakuratannya karena penyusunan laporan keuangan secara manual lebih besar resiko terjadi kesalahan. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan, teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan (Primayana *et al.*, 2014).

Pengendalian Intern

PP No. 60 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (1) Keterandalan pelaporan keuangan. (2) Efisiensi dan efektivitas operasi. (3) Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern Akuntansi merupakan rencana organisasi dan metode yang bertujuan untuk mengamankan aset yang ada pada organisasi tersebut, serta menguji sejauh mana data akuntansi dapat dipercaya. Pengendalian intern digunakan untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu dikerjakan dan mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang sudah ditetapkan. Pengendalian Intern tidak digunakan untuk menghilangkan peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan, tetapi dengan adanya pengendalian intern yang baik akan menekan resiko terjadinya hal tersebut sehingga dapat segera diketahui dan diatasi secara cepat agar tidak menimbulkan kerugian.

Pelaksanaan pengendalian intern dapat dilakukan sebelum, selama dan sesudah terjadinya kegiatan yang tujuannya adalah untuk menguji akurasi dan keandalan data akuntansi dan menjamin efisiensi operasi. Pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Purwono, 2004:126). Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dijalankan. Kebijakan dan prosedur tersebut membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah

Pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah struktur dan proses meliputi segala aspek yang berkaitan dengan bagaimana penyediaan, pelaporan dan penyampaian

informasi keuangan suatu pemerintahan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan yang akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial (Suwardjono, 2012:110). Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat, peraturan yang berlaku termasuk Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), dan mekanisme penyampaian informasi. Sedangkan laporan keuangan merupakan medium dalam penyampaian informasi.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan suatu daerah dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder), tentang kondisi keuangan pemerintah (Indriasari dan Nahartyo, 2008). PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyebutkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Dalam kasus ini pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan dari laporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andal akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu.

Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002:146). Dengan kata lain, laporan keuangan yang baik dan tepat waktu membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengerjaannya. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Imelda (2005), Prpto (2010) maupun Roshanti *et al.*, (2014) dengan hasil menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Teknologi informasi merupakan teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi dan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja baik pemerintahan maupun perusahaan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi tersebut (Wansyah *et al.*, 2009). Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan komputer, software/perangkat lunak, dan lainya yang sejenis secara optimal (Wilkinson *et al.*, 2000). Dalam hal ini komputer merupakan bagian terpenting dari teknologi informasi akan sangat membantu peningkatan kualitas dari informasi.

Perubahan dalam pola penyusunan laporan keuangan daerah yang awalnya secara manual dilihat tidak efektif, efisien dan untuk nilai keandalan suatu laporan keuangan masih kurang keakuratannya karena penyusunan laporan keuangan secara manual lebih besar resiko terjadi kesalahan, oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan, teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan (Primayana *et al.*, 2014).

Dari pengertian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indriasari dan Nahartyo (2008) maupun Roshanti *et al.*, (2014) dengan hasil menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, hal ini menyatakan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multi-processing*. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

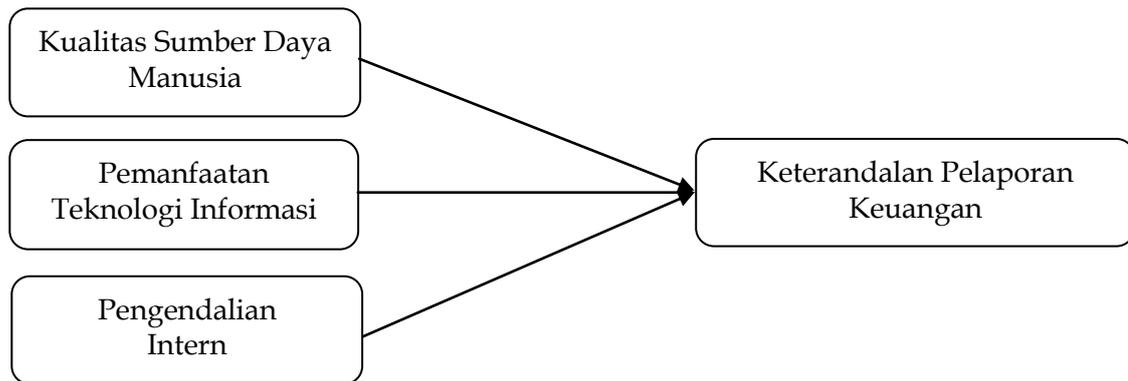
Menurut Mulyadi (2010) pengendalian intern akuntansi dirancang dari dua tujuan sistem yaitu menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek ketelitian serta keterandalan informasi akuntansi. Pengendalian intern akuntansi meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang bertujuan untuk mengamankan aktiva dan juga agar dapat dipercayainya catatan keuangan. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk memberikan keyakinan akan transaksi-transaksi apakah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Mencatat transaksi dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria yang ditentukan yang sesuai dengan tujuan laporan tersebut.

Pengendalian Intern tidak digunakan untuk menghilangkan peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan, tetapi dengan adanya pengendalian intern yang baik akan menekan resiko terjadinya hal tersebut sehingga dapat segera diketahui dan diatasi secara cepat agar tidak menimbulkan kerugian. Pelaksanaan pengendalian intern dapat dilakukan sebelum, selama dan sesudah terjadinya kegiatan yang tujuannya adalah untuk menguji akurasi dan keandalan data akuntansi dan menjamin efisiensi operasi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelda (2005) dan Prapto (2010) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern sebagai variabel independen terhadap keterandalan pelaporan keuangan sebagai variabel dependen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena menitikberatkan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dari penelitian ini adalah SKPD Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*, cara pengambilan sampel tipe yang berarti bahwa pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 48 SKPD Provinsi Jawa Timur. Kriteria atau pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud adalah pejabat yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan Bekerja di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Timur lebih dari lima tahun.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik sekelompok orang/seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei yang dimana metode pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (Variabel Bebas) yaitu variabel yang memengaruhi variabel lain. Variabel Dependen (Variabel Terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Sanusi, 2014).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah keterandalan pelaporan keuangan.

Definisi Operasional Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Untuk mengukur variabel ini menggunakan *skala likert*. Menurut Yosefrenaldi (2008) Terdapat 4 indikator yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yaitu: (1) Latar belakang pendidikan pada sub bagian keuangan/akuntansi. (2) Peran dan tanggung jawab sub bagian keuangan. (3) Pelatihan keahlian dalam tugas. (4) Sumber daya manusia yang berpengalaman.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, pengukurannya berdasar-kan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan. Untuk mengukur variabel ini menggunakan *skala likert* dan menunjukkan sejauh mana teknologi informasi dalam menyusun laporan keuangan. Menurut Yosefrenaldi (2008) Terdapat 5 indikator yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi yaitu: (1) Penggunaan secara optimal dari komputer dan perangkat lunak. (2) Aplikasi *software* yang digunakan. (3) Proses akuntansi secara komputerisasi. (4) Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi. (5) Perawatan perangkat yang digunakan.

Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mengukur variabel ini menggunakan *skala likert* dan menunjukkan tingkat pengendalian dalam proses menyusun laporan keuangan. menurut Ariesta (2013) terdapat 5 indikator yang mempengaruhi pengendalian intern, yaitu: (1) *Standard Operating Procedure* (SOP). (2) Pemisahan wewenang. (3) Dokumen dan catatan yang memadai. (4) Pembatasan akses. (5) Langkah-langkah pencegah kecurangan.

Keterandalan Pelaporan Keuangan

PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyebutkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dengan *skala likert* dan menunjukkan tingkat keandalan laporan keuangan pemerintah. Terdapat 5 indikator yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan yaitu: (1) Adanya transaksi keuangan yang jujur dan wajar. (2) Adanya laporan keuangan pokok sesuai aturan. (3) Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. (4) Adanya rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik. (5) Informasi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan umum.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis yang dimana perhitungannya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 23 yang bertujuan untuk menentukan pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dengan bantuan perangkat lunak SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar daripada angka kritik ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Pengujian kualitas data dilakukan dengan sampel uji coba sebanyak 96 orang. Angka kritik pada penelitian ini adalah $N-2 = 96-2 = 94$ dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$, maka r_{tabel} untuk angka kritik dalam penelitian ini adalah 0,2006. Berikut ini adalah uji validitas dengan program SPSS versi 23 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r hitung	r tabel ($\alpha=5\%$)	Keterangan
Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah	KP1	0,425	0,2006	Valid
	KP2	0,434	0,2006	Valid
	KP3	0,424	0,2006	Valid
	KP4	0,504	0,2006	Valid
	KP5	0,686	0,2006	Valid
	KP6	0,552	0,2006	Valid
	KP7	0,558	0,2006	Valid
	KP8	0,538	0,2006	Valid
	KP9	0,619	0,2006	Valid
	KP10	0,358	0,2006	Valid
Kualitas Sumber Daya Manusia	KM1	0,372	0,2006	Valid
	KM2	0,557	0,2006	Valid
	KM3	0,745	0,2006	Valid
	KM4	0,747	0,2006	Valid
	KM5	0,749	0,2006	Valid
	KM6	0,682	0,2006	Valid
	KM7	0,552	0,2006	Valid
	KM8	0,368	0,2006	Valid
	KM9	0,714	0,2006	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	TI1	0,717	0,2006	Valid
	TI2	0,831	0,2006	Valid
	TI3	0,883	0,2006	Valid
	TI4	0,826	0,2006	Valid
	TI5	0,724	0,2006	Valid
	TI6	0,752	0,2006	Valid
	TI7	0,717	0,2006	Valid
	TI8	0,818	0,2006	Valid
Pengendalian Intern	PI1	0,473	0,2006	Valid
	PI2	0,535	0,2006	Valid
	PI3	0,487	0,2006	Valid
	PI4	0,526	0,2006	Valid
	PI5	0,583	0,2006	Valid
	PI6	0,646	0,2006	Valid
	PI7	0,739	0,2006	Valid
	PI8	0,657	0,2006	Valid
	PI9	0,395	0,2006	Valid

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan item pernyataan dari masing-masing variabel dapat dikatakan valid, karena mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > 0,2006$).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana jawaban dari kuesioner tersebut memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Menurut Ghazali (2005:42) menyatakan bahwa jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa konstruk atau variabel penelitian tersebut dapat dikatakan handal dan reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas nilai *cronbach's alpha* dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha (α)	Koefisien alpha	Keterangan
Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah	0,665	0,60	Reliabel
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,794	0,60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,910	0,60	Reliabel
Pngendalian Intern	0,687	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *cronbach's alpha* yang terdapat pada tabel diatas yaitu keterandalan pelaporan keuangan daerah 0,665, sedangkan kualitas sumber daya manusia sebesar 0,794, pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,910 dan pengendalian intern sebesar 0,687. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa pengukuran data sudah dapat dipercaya (*reliable*).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu mengenai kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah provinsi jawa timur. Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, diolah dengan menggunakan SPSS versi 23.0 dengan menggunakan hasil perhitungan yang tersaji pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	,411	3,402	,121	,904
KM	,367	,064	5,688	,000
TI	,408	,056	7,257	,000
PI	,371	,069	5,347	,000

Dependent Variable: KP

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 3, maka penjelasan keterandalan pelaporan keuangan daerah dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$KP = 0,411 + 0,0367KM + 0,408TI + 0,371PI + e$$

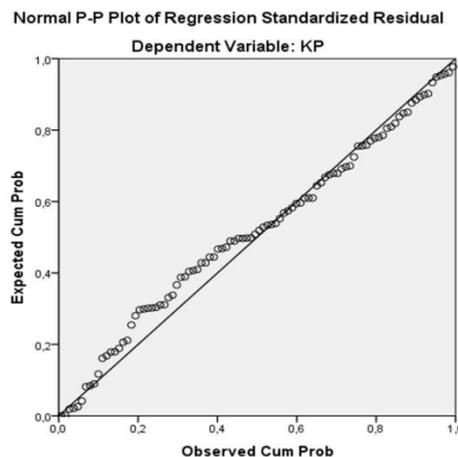
Persamaan regresi yang didapat menunjukkan variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern memiliki koefisien yang bertanda positif. Penjelasan untuk persamaan diatas adalah: (1) Apabila kualitas sumber daya manusia suatu pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan semakin baik maka akan meningkatkan keandalan laporan keuangan dan sebaliknya jika kualitas sumber daya

manusia suatu pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan semakin buruk maka akan menurunkan keandalan laporan keuangan. (2) Apabila pemanfaatan teknologi informasi semakin baik dan memadai maka akan meningkatkan keandalan laporan keuangan dan sebaliknya jika pemanfaatan teknologi informasi semakin buruk dan tidak memadai yang menyebabkan kesalahan dan keterlambatan dalam membuat laporan keuangan maka akan menurunkan keandalan laporan keuangan. (3) Apabila pengendalian intern suatu pemerintahan semakin baik maka akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan dan sebaliknya jika pengendalian intern suatu pemerintahan tersebut semakin buruk dan lemah maka akan menurunkan keterandalan pelaporan keuangan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variable *dependen* (terikat) dan variable *independen* (bebas) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak yang dapat dilihat dengan menggunakan Normal P-P Plot dan Diagram Histogram yang tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Data dalam keadaan normal apabila distribusi data menyebar disekitar garis diagonal. Uji normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data yang mengikuti garis normal seperti yang dapat dilihat pada gambar 2:



Sumber: Data primer diolah
Gambar 2
Uji Normalitas

Berdasarkan pada gambar 2 *Normal P- P Plot Regression Standardized* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari grafik pada pengujian normalitas dapat diketahui bahwa distribusi data telah mengikuti garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu Y (*Expected Cum. Prob.*) dengan sumbu X (*Observed Cum Prob.*) Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila dari hasil pengujian diperoleh nilai TOL lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF menunjukkan kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas (Ghozali, 2011:106). Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinieritas pada tabel 4:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
KM	,915	1,093
TI	,858	1,166
PI	,817	1,224

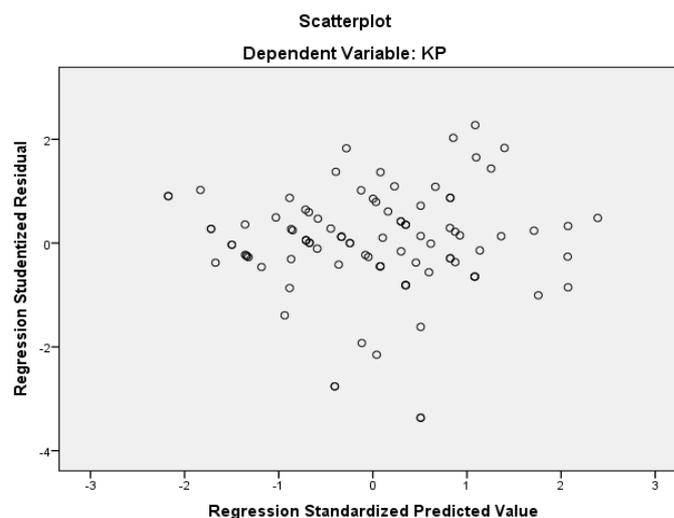
a. Dependent Variable: KAP

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui nilai *tolerance* (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai TOL > 0,10 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahawa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi perbedaan varian residual dari suatu periode pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual dari suatu periode pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat gambar hasil SPSS berikut ini :



Sumber: Data primer diolah

Gambar 3

Uji Heteroskedastisitas

Dengan menggunakan metode grafik, menunjukkan penyebaran titik-titik data yaitu : (1) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau di sekitar angka 0. (2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja. (3) Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. (4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola. Berdasarkan gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model yang menunjukkan apakah model regresi *Goodness Offit* untuk diolah lebih lanjut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil dari uji kelayakan model yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	524,041	3	174,680	57,100	,000 ^b
Residual	281,448	92	3,059		
Total	805,490	95			

a. Dependent Variable: KP

b. Predictors: (Constant), PI, KM, TI

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan pada tabel 5 maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 57,100 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dihasilkan baik dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi menunjukkan proporsi dari varian yang diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Dari uji determinasi dihasilkan nilai R² sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,807 ^a	,651	,639	1,749

a. Predictors: (Constant), PI, KM, TI

b. Dependent Variable: KP

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan pada tabel 6 dapat dilihat bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *Adjusted R Square* pada penelitian ini sebesar 0,639 atau 63,90%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern menjelaskan variabel keterandalan pelaporan keuangan daerah adalah sebesar 63,90% sedangkan sisanya 36,10% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara parsial atau individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan SPSS 23 didapat hasil uji t seperti yang tersaji pada tabel 7 berikut

Tabel 7
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	411	3,402		,121	,904	
1	KM	,367	,064	,366	5,688	,000
	TI	,408	,056	,483	7,257	,000
	PI	,371	,069	,365	5,347	,000

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 7 dapat kita diinterpretasikan sebagai berikut: (1) Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis pertama (H_1) diterima. (2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis kedua (H_2) diterima. (3) Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelda (2005), Prapto (2010) maupun Roshanti *et al.*, (2014), mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara kualitas sumber daya manusia dengan keterandalan pelaporan keuangan daerah, hal ini berarti bahwa semakin memadai kualitas sumber daya manusia maka pemerintah daerah juga akan semakin baik dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal. Dengan kualitas sumber daya manusia yang dalam hal ini kemampuan sumber daya manusia tersebut untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai akan membantu menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan yang diberikan kepadanya. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) maupun Roshanti *et al.*, (2014), mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan pelaporan keuangan daerah, hal ini berarti bahwa semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi maka akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam pelaporan keuangan yang menjadi lebih andal. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasaan yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang lebih andal karena

pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material. Dalam hal ini komputer merupakan bagian terpenting dari teknologi informasi akan sangat membantu peningkatan kualitas dari informasi.

Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian menemukan bahwa pengendalian intern memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelda (2005) dan Prapto (2010), mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara sisa lebih pengendalian intern dengan keterandalan pelaporan keuangan daerah, hal ini berarti bahwa semakin baik pengendalian intern akuntansi yang ada maka pemerintah daerah juga akan semakin baik dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan tercermin dalam beberapa hal diantaranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem otorisasi, adanya pemisahan tugas, dan adanya sistem formulir, dokumen dan catatan, yang mana semua hal tersebut akan mendukung fungsi keuangan pada pemerintah daerah dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal. Pengendalian Intern tidak digunakan untuk menghilangkan peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan, tetapi dengan adanya pengendalian intern yang baik akan menekan resiko terjadinya hal tersebut sehingga dapat segera diketahui dan diatasi secara cepat agar tidak menimbulkan kerugian. Pelaksanaan pengendalian intern dapat dilakukan sebelum, selama dan sesudah terjadinya kegiatan yang tujuannya adalah untuk menguji akurasi dan keandalan data akuntansi dan menjamin efisiensi operasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melalui beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Berdasarkan uji kelayakan model diketahui bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern model layak digunakan dalam penelitian terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah. (2) Pengujian pengaruh kualitas sumber daya manusia pada keterandalan pelaporan keuangan daerah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Dengan kata lain SKPD Provinsi Jawa Timur sudah di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai. (3) Pengujian pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan seluruh SKPD Provinsi Jawa Timur sudah menggunakan teknologi komputer dalam kerjanya. (4) Pengujian pengaruh pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern di SKPD Provinsi Jawa Timur sudah memadai.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Kepada pihak terkait dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang andal, disarankan untuk melakukan peningkatan dalam hal kualitas sumber daya manusia yang baik, pengendalian intern

akuntansi yang lebih memadai, pemanfaatan teknologi informasi lebih optimal lagi, dan pengawasan terhadap keuangan daerah lebih intensif lagi. (2) Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden dan memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini atau menggunakan kuesioner yang tingkat validitas dan reliabilitasnya lebih tinggi. (3) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang masih mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan daerah misalnya pengawasan keuangan daerah dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, F. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Yogyakarta.
- Brigham, E. F. dan J. F. Houtson. 2006. *Dasar-dasar manajemen keuangan*. Edisi kesepuluh. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Edisi Ketiga. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Havesi, G. A. 2005. Standards for Internal Control in New York State Government. www.osc.state.ny.us. 04 April 2017.
- Hamzah. 2009. Pengaruh Ekspekstasi Kinerja, Ekspekstasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura). *Simposium Nasional Sistem Teknnologi Informasi*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Imelda. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Universitas Sriwijaya. Indralaya.
- Indriasari, D. dan E. Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Jensen, M. dan Meckeling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Finance Economic*. V. 3, hal 305.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2010. *Akuntansi Biaya*. Edisi kelima. Cetakan ketujuh. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- _____. Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- _____. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Prpto, S. 2010. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pemanfaatan Teknologi Informasi*. 1.
- Primayana, K., A. Atmadja dan N. Darmawan. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi. *E-Journal* 2(1).

- Purwono, E. 2004. *Aspek-aspek EDP Audit Pengendalian Internal pada Komputerisasi*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2007. *Aspek-aspek EDP Audit Pengendalian Internal pada Komputerisasi*. Andi. Yogyakarta
- Roshanti, A., E. Sujana dan K. Sinarwati. 2014. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal 2(1)*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Safitri, R. A. 2009. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sanusi, A. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suwardjono. 2012. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Tjiptoherijanto, P. 2001. Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan. *Majalah Perencanaan Pembangunan*. Edisi 23. Jakarta.
- Wansyah H, Darwanis dan Bakar. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*. 1(1).
- Wilkinson, J. W., M. J. Cerullo., V. Raval dan Bernard. 2000. *Accounting Information System Essential Concept and Application*. 4 Edition. John Willey and Sons Inc. New York.
- Yosefrinaldi. 2008. Pengaruh Kapasitas Intelektual Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.